



Made Urip Kembali "Daratkan" 40 Traktor di Tabanan Bantu Alsintan Senilai Total Rp 1,43 Miliar

ANGGOTA Komisi IV DPR-RI dari Fraksi PDI Perjuangan Drs. I Made Urip, M.Si. kembali "mendaratkan" bantuan 40 unit traktor di Tabanan. Bantuan itu merupakan sebagian dari alat mesin pertanian (alsintan) yang diperjuangkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan itu bagi kelompok tani dan *krama* subak di Kabupaten Tabanan tahun 2018 senilai total Rp 1,43 miliar. Sebelumnya, Made Urip menggelontorkan alsintan di Kabupaten Bangli senilai total Rp 1,95 miliar, Sabtu (4/8) lalu. Penyerahan bantuan, sekaligus bertatap muka ratusan petani dan *krama* subak di Tabanan ini dihadiri anggota Fraksi PDI-P DPRD Tabanan I Made Dirga bersama Kadis Tanaman Pangan Tabanan, Dinas Perikanan Tabanan, Ketua Kelompok Tani dan Subak penerima bantuan se-Kabupaten Tabanan di UPT Balai Pembibitan Tanaman Pangan; Desa Bongan, Tabanan, Selasa (7/8) kemarin.

Bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Made Urip itu dari Program Kementerian Pertanian yang difasilitasi dan direalisasikan langsung oleh Made Urip di tingkat pusat, berupa 40 unit *handtractor* senilai Rp 1,2 miliar, 10 unit mesin *power thresher* sebesar Rp 150 juta dan mesin *combine harvester* Rp 80 juta. Pada kesempatan itu, *Pekaseh* Subak Nyitdah III Made Pedra mewakili *krama* subak memberikan apresiasi kepada Made Urip sebagai wakil rakyat di pusat yang telah memperhatikan petani di Tabanan lewat bantuan alsintan untuk memproduksi pertanian. Made Urip dinilai sudah memberikan kontribusi luar biasa bagi petani dan diharapkan nantinya juga dibantu subsidi pupuk secara berkesinambungan.

Hal senada disampaikan Sekre-



BANTUAN - Anggota Komisi IV DPR-RI Drs. I Made Urip, M.Si. menyalurkan bantuan alsintan senilai total Rp 1,43 miliar untuk kelompok tani dan *krama* subak di Tabanan tahun 2018.

taris Poktan Subak Bengkel I Ketut Subawa. "Karena itu kita ucapkan terima kasih kepada Pak Urip atas bantuan aspirasi ini," ujarnya seraya mengakui peran Made Urip sebagai salah satu wakil rakyat benar-benar memperjuangkan aspirasi petani di tingkat pusat. Made Urip, kata Subawa, juga berpesan agar lahan yang ada jangan dialihfungsikan.

Made Urip sebagai wakil rakyat di pusat berharap bantuan alsintan agar dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. "Jadi saking cintanya dengan petani saya hadir di sini menurunkan APBN 2018 untuk pembangunan di sektor pertanian yang menjadi *leading sector* di Tabanan," katanya. Menurut anggota dewan yang dijuluki Wakil Rakyat Seribu Traktor itu, untuk meningkatkan produktivitas disiapkan alsintan, agar sektor pertanian menjadi andalan pemerintah. Karena itu awalnya anggaran sektor pertanian dari Rp 2,3 triliun sekarang minimal sudah Rp 70 triliun.

Untuk itulah, dikatakan, saat ini yang harus diperhatikan adalah melindungi lahan produktif dari alih fungsi lahan, agar tidak berbuah beton. "Padahal kita harus jaga lahan produktif dari serangan alih fungsi lahan. Sekali dibuka akan hilang lahan produktif kita dan akan habis karena tidak bisa akan dikembalikan lagi," bebarnya sekaligus menyampaikan pemikiran terkait regenerasi pertanian yang harus dipikirkan penerusnya dan dicarikan jalan oleh pemerintah termasuk penanganan pascapanennya, sehingga pertanian menjadi lebih menarik. Caranya seperti di beberapa daerah hasil produksi dibeli oleh pemerintah. Seperti gabah dan hortikultura dibeli oleh pemerintah dan dicarikan pasarnya, sehingga panen dan produksinya aman. Dalam kesempatan tersebut, ia meminta dukungan petani dan *krama* subak, karena ditugaskan partai kembali maju sebagai Baca-leg DPR-RI nomor urut 1 dari PDI Perjuangan. (ad360)

Edisi : Rabu, 8 Agustus 2018

Hal : 4



Tutupi Defisit Rp 31 Miliar

Dewan dan Pemkab Bingung Cari Dana

Tabanan (Bali Post) -

APBD Tabanan tahun 2018 telah berjalan sampai Juli. Hingga pertengahan tahun anggaran, APBD Tabanan sudah mengalami defisit sebesar Rp 41 miliar akibat turunnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari jumlah tersebut, baru bisa ditutupi dana dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 10 miliar, sehingga masih ada defisit Rp 31 miliar. Masalah ini membuat dewan dan eksekutif yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bingung mencari dana untuk menutupi defisit tersebut.

Munculnya defisit terungkap dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan dengan TAPD Tabanan, Senin (6/8) kemarin, di ruang rapat pleno DPRD Tabanan. Rapat dipimpin Ketua DPRD yang juga Ketua Banggar I Ketut Suryadi. Sementara TAPD Pemkab Tabanan dipimpin Sekda I Nyoman Wirna Ariwangsa.

Pada kesempatan tersebut, Suryadi mempertanyakan tidak tercapainya target pendapatan daerah termasuk terjadinya defisit yang mencapai Rp 41 miliar. Terkait hal itu, Sekda Wirna Ariwangsa menjelaskan, defisit terjadi akibat potensi pendapatan daerah turun. Pendapatan dimaksud seperti BPHTB dan pajak daerah lainnya. "Memang terjadi penurunan target pendapatan seperti dari PHR karena berhentinya operasi NBR serta sektor lainnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Bapelitbang I.B. Wirtamaja mengatakan, untuk menutupi defisit yang sebesar Rp 41 miliar, awalnya pihaknya mengandalkan dana bantuan provinsi sebesar Rp 10 miliar dan dana dari BRSU Tabanan

sebesar Rp 13 miliar sehingga masih kurang sekitar Rp 18 miliar. Namun ternyata dana dari BRSU Tabanan tidak bisa dipakai untuk menutup defisit tersebut, karena harus digunakan untuk membeli obat. "Jadi masih ada defisit sekitar Rp 31 miliar. Sementara dari pusat sudah tidak ada lagi kucuran dana," katanya.

Mendengar hal tersebut, Suryadi meminta eksekutif segera mencari jalan keluar. Dia melihat banyak potensi pendapatan yang masih bisa dioptimalkan seperti dari DTW. Dia juga mempertanyakan kenapa target dari DTW juga diturunkan. Padahal tarif sudah ditingkatkan, kemudian kedatangan wisatawan relatif sama. Apalagi ada rencana penerapan *e-billing* untuk tiket masuk. Bahkan dia mendesak agar target tersebut dinaikkan sesuai target awal.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi III I Wayan Lara. Menurut dia, dengan terjadinya defisit, TAPD maupun OPD penghasil harus kerja keras untuk merealisasikan target tersebut untuk membiayai pembangunan. "Semestinya dengan

kondisi tersebut, OPD penghasil kreatif dan inovatif mencari terobosan untuk peningkatan PAD," tegasnya.

Wayan Sudiana alias Gading juga melihat banyak potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal seperti dari sektor hotel dan restoran. Padahal banyak usaha perhotelan termasuk vila dan penginapan serta restoran yang bisa menjadi objek pajak. Apalagi ada aturan baru yang memperbolehkan pemerintah memungut pajak, meski suatu belum berizin.

Terkait desakan tersebut, Kepala Bakeuda I Dewa Ayu Sri Budiarti mengatakan, pihaknya meningkatkan target pendapatan seperti semula termasuk dari DTW yang semua sekitar Rp 6,5 miliar per bulan menjadi sekitar Rp 10 miliar. Dengan demikian, terjawab upaya untuk menutupi defisit.

Namun muncul persoalan baru ketika Ketua DPRD Suryadi mempertanyakan soal anggaran untuk perubahan 2018. Dia menilai, paling tidak dibutuhkan dana sekitar Rp 20 miliar. Atas permintaan tersebut eksekutif nampaknya belum bisa menjawab secara pasti. Muncul usulan untuk rasionalisasi anggaran yang ada, termasuk menunda program yang sudah dibuat dan dilaksanakan di tahun anggaran 2019. "Soal dana untuk perubahan akan kita bicara di tingkat pimpinan. Minimal bisa melakukan rasionalisasi. Terpenting, dalam waktu dekat KUA dan PPAS harus segera disepakati agar eksekutif bisa menyusun anggaran," tegasnya. (kmb28)

Edisi : Selasa, 7 Agustus 2018

Hal : 7



Terkait Kasus Korupsi Perjalanan Dinas

Jaksa Eksekusi Winasa di Rutan Negara

Negara (Bali Post) -

Putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) terkait kasus korupsi perjalanan dinas (perdin) dengan terpidana I Gede Winasa telah diterima. Menindaklanjuti putusan tersebut, Senin (6/8) kemarin Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana melakukan eksekusi terhadap mantan Bupati Jembrana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Negara.

Winasa divonis 6 tahun pidana penjara serta denda Rp 200 juta subsidi enam bulan. Selain itu juga pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 797.554.800. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Jaksa dari Kejari Jembrana Ni Wayan Mearthi dan Ni Ketut Lili Suryanti itu sempat ditanggapi Winasa dengan berdebat.

Saat disampaikan Jaksa untuk melakukan eksekusi terkait putusan kasus korupsi perdin, Winasa langsung menjawab akan melakukan peninjauan kembali (PK). Winasa mengungkapkan sejak kasus beasiswa Stikes dan Stitna, di mana dirinya diganjar

tujuh tahun penjara, ia belum menerima putusan lengkap. Namun, sekarang sudah muncul lagi putusan kasasi perdin yang juga tidak ada putusan lengkap.

Petugas rutan akhirnya menengahi perdebatan itu dan Winasa akhirnya mau menandatangani. Mearthi menegaskan tujuan Jaksa datang ini untuk eksekusi putusan MA terkait kasus perjalanan dinas. Kasus korupsi perdin ini saat awal disidangkan di Pengadilan Tipikor Denpasar diputus 4 tahun pidana penjara dan denda Rp 200 juta subsidi 6 bulan kurungan.

Lantas di tingkat banding, pengadilan tinggi putusan menguatkan putusan sebelumnya. Putusan ini lebih ringan 3 tahun dari tuntutan JPU, yakni 7 tahun penjara. Lalu ditempuh upaya hukum kasasi. Namun di tingkat MA, hukuman Winasa justru bertambah menjadi selama 6 tahun penjara. Sebelum kasus perdin ini, Winasa juga menjalani hukuman kasus korupsi Stikes dan Stitna dengan vonis 7 tahun. (kmb26)



EKSEKUSI - Jaksa Pengadilan Negeri Jembrana saat melakukan eksekusi terhadap mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa di Rutan Negara, Senin (6/8) kemarin. Winasa dieksekusi terkait kasus korupsi perjalanan dinas dengan hukuman enam tahun penjara.

Edisi : Selasa, 7 Agustus 2018

Hal : 10



Kasus Dugaan Korupsi Biogas Kerugian Negara Capai Rp 792 Juta

Semarapura (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi proyek biogas di Nusa Penida terus diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung. Hasil penghitungan kerugian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang cukup lama ditunggu, akhirnya telah turun. Besarannya mencapai Rp 792.912.654, mendekati nilai proyek Rp 890 juta. Hal tersebut diakui Kasi Pidana Khusus Kejari Klungkung I Kadek Wira Atmaja saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (3/8) kemarin.

Hasil penghitungan kerugian resmi diterima 20 Juli lalu. Hal tersebut diduga muncul akibat adanya pengurangan spek proyek. Saat Kasi Pidsus dijabat Meyer Volmar Simanjuntak menyebutkan sudah ada nama calon tersangka dalam kasus ini, lebih dari satu orang. Namun, Atmaja belum bisa mengungkapkan hal itu. Sebab, ia mengaku belum sebulan menjabat. Ia mengaku akan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"BAP sudah ada. Kita akan pelajari dulu. Mana yang kurang, itu akan dilengkapi lagi. Dalam waktu dekat, kita akan ekspos perkara bersama tim," jelasnya didampingi salah satu penyidik, Cokorda Agung Indrasunu.

Pejabat asal Denpasar ini menyatakan sejak penyelidikan dimulai dari akhir 2016, sejumlah pihak telah diperiksa, mulai dari pejabat pemkab selaku pengguna anggaran, pelaksana proyek, penerima bantuan hingga konsultan perencanaan dan pengawas. "Sudah banyak yang diperiksa," sebutnya seraya menegaskan pengusutan kasus ini terus berlanjut hingga tuntas.

tersebar di Desa Kutampi Kaler, Sakti, dan Klumpu dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, ditambah sepuluh persen dana pendampingan dari APBD Klungkung. Sesuai has pengecekan dari 40 titik, yang dikerjakan hanya 38 titik dan seluruhnya mangkrak. Sementara sisanya lagi dua titik laporannya dibuat fiktif. Proyek yang berjalan tahun 2014 itu dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Keluarga Berencana (KB) yang kini menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB. (kmb45)



I Kadek Wira Atmaja

Bali Post

Edisi : Sabtu, 4 Agustus 2018

Hal : 12